

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Qur'an Surat Al Fathir ayat 12, Allah berfirman yang artinya," Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur."

Sudut pandang Al Qur'an mengenai bidang Perikanan. Dalam UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan, Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Ikan adalah makhluk hidup yang seluruh atau sebagian fase hidupnya di dalam air, bernafas dengan insang dan dapat dikelompokkan berdasarkan habitatnya yakni ikan air tawar dan ikan air laut.

Produk perikanan Indonesia yang dimanfaatkan sebagai komoditi ekspor terdiri atas beberapa jenis, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Hasil perikanan darat berasal dari empang dan tambang. Sedangkan hasil dari perikanan laut meliputi udang laut, tuna, fillet kakap dan lainnya. Sebagaimana perairan darat, perairan laut juga sangat bermanfaat bagi kehidupan kita perairan laut memiliki biota yang sangat kaya dan bernilai ekonomis tinggi. Dan banyak pula sumber makanan yang memiliki nilai gizi tinggi dan rasanya lezat kita

dapatkan dari perairan laut. Contohnya: ikan, keong, teripang, udang, rajungan, kerang dan lain-lain.

Dalam suatu wilayah terdapat banyak kekayaan alam. Kekayaan alam tersebut dapat menghasilkan keuntungan dan manfaat yang besar apabila diolah dengan baik. Apabila suatu wilayah mengandung banyak kekayaan alam, namun tidak ada pengetahuan dan teknologi yang dapat dikatakan tidak mempunyai harga. Sebaliknya, meskipun ada kemampuan berupa pengetahuan dan keterampilan tinggi, tetapi tidak dipraktekkan karena tidak ada kesempatan atau karena faktor-faktor lain yang tidak memungkinkan interaksi, maka semua itu menjadi tidak berguna.

Menurut Daryanto (2007), sumber daya pada sektor perikanan merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi nasional. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa pertama, Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun diversitas. Kedua, Industri di sektor perikanan memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya. Ketiga, Industri perikanan berbasis sumber daya nasional atau dikenal dengan istilah *national resources based industries*, dan keempat Indonesia memiliki keunggulan (*comparative advantage*) yang tinggi di sektor perikanan sebagaimana dicerminkan dari potensi sumber daya yang ada.

Potensi ekonomi sumber daya pada sektor perikanan diperkirakan mencapai US\$ 82 miliar per tahun. Potensi tersebut meliputi: potensi perikanan tangkap sebesar US\$ 15,1 miliar per tahun, potensi budidaya laut sebesar US\$ 46,7 miliar per tahun, potensi perairan umum sebesar US\$ 1,1 miliar per tahun, potensi budidaya tambak sebesar US\$ 10 miliar per tahun, potensi budidaya air tawar sebesar US\$ 5,2 miliar per tahun, dan potensi bioteknologi kelautan sebesar US\$ 4 miliar per tahun. Selain itu, potens lainnya pun dapat dikelola,

seperti sumber daya yang tidak terbaharukan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan Indonesia.

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak potensi sumber daya alam. Salah satu sumber daya alamnya yang melimpah adalah sektor kelautan dan perikanan. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar adalah Provinsi Jawa Timur dengan luas perairan sebesar 208.138 km², yang mana meliputi Selat Madura, Laut Jawa, Selat Bali dan Samudera Indonesia dengan panjang garis pantai 1.600 km. Panjangnya garis pantai tersebut melewati beberapa kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan terbesar dan salah satunya yaitu Kabupaten Pasuruan.

Wilayah Kabupaten Pasuruan secara geografis terdiri dari pegunungan, dataran rendah dan kawasan pantai. Sebagian dari wilayah tersebut mempunyai sumberdaya alam yang potensial untuk pengembangan usaha perikanan. Potensi Kelautan dan Perikanan yang terdapat di Kabupaten Pasuruan meliputi wilayah perairan laut yang terbentang sepanjang ± 48 km mulai dari kecamatan Nguling sampai Bangil. Yang terdiri atas kawasan danau, perikanan air tawar dan perikanan air payau yang sangat potensial untuk dikembangkan.

Bagian utara Kabupaten Pasuruan yang didominasi oleh daerah pantai, ternyata mampu menghasilkan potensi kelautan dan perikanan yang memiliki nilai jual cukup tinggi dipasaran. Sebut saja seperti budidaya udang vannamei dan udang windu yang mulai dibudidayakan di empat wilayah kecamatan yaitu Kec. Bangil, Kraton, Rejoso serta Kec. Lekok dengan luas lahan sekitar 3.966,9 Ha. Budidaya rumput laut juga mulai dikembangkan di kecamatan Bangil, Kraton, Rejoso dan Lekok dengan memanfaatkan luas pantai sekitar 225 Ha. Sedangkan untuk potensi ikan air tawar, mulai dikembangkan masyarakat dengan sistem budidaya keramba apung serta pemetaan kolam yang tersebar di beberapa

kecamatan. Untuk sistem budidaya keramba jaring apung, dilakukan di Danau Ranu Grati dengan luas keramba sekitar 3,5 Ha. Dan untuk pemetaan kolam ikan air tawar dilakukan berdasarkan jenis ikan dan kecamatan, seperti misalnya ikan lele di Kecamatan Beji, bawal tawar di Kecamatan Gempol, Patin di kecamatan Grati dan Beji, Nila dan mujaer di kecamatan Grati dan Winongan, Gurame di kecamatan Lekok, Rejoso dan Rembang, serta udang Galah di kecamatan Pandaan.

Indonesia sudah mengalami perkembangan perekonomian yang cukup pesat. Adanya perkembangan perekonomian tersebut pemerintah diharapkan dapat menciptakan sistem perekonomian yang baik sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan cita-cita suatu negara. Potensi sumber daya pada setiap daerah yang berbeda dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan nasional di Indonesia dan menjadi sumber pendapatan daerah.

Berdasar semangat otonomi daerah maka pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah kota dan kabupaten, untuk pelaksanaan pembangunan daerah tersebut tidak lepas dari ketersediaan dana yang sangat menunjang program-program yang telah disusun, dimana hampir 60% pengeluaran pemerintah daerah dibiayai oleh transfer dari pusat (Basri, 2006).

Secara ekonomi, pengelolaan perikanan ditujukan untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Pencapaian pendapatan maksimum nelayan atau pembudidaya ikan dihadapkan pada berbagai faktor pembatas, seperti potensi sumberdaya, harga input-output sumberdaya, tenaga kerja, modul, faktor musim dan input penunjang lainnya.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan menjelaskan sumber pendapatan daerah berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dana pertimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pengertian di atas menjelaskan bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari hasil retribusi daerah. Hasil retribusi daerah dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan berbagai potensi perikanan yang ada di Kabupaten Pasuruan, seharusnya sektor perikanan di Kabupaten Pasuruan dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan. Akan tetapi kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa sektor perikanan di Kabupaten Pasuruan hanya memberikan kontribusi yang kecil. Dengan demikian perlu dilakukan untuk menganalisis potensi sektor perikanan Kabupaten Pasuruan. Bertitik tolak dari pertimbangan di atas penulis termotivasi untuk menelaah dan menganalisis potensi perikanan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) khususnya di Kabupaten Pasuruan yang kemudian penulis tuangkan ke dalam karya tulis dengan judul: "ANALISIS POTENSI SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN PASURUAN, JAWA TIMUR".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian, maka peneliti memaparkan beberapa masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana potensi sektor perikanan di Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana hubungan antara sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan?

3. Bagaimana kontribusi yang diberikan sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Mengidentifikasi potensi sektor perikanan di Kabupaten Pasuruan.
2. Menganalisis hubungan antara sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan.
3. Menganalisis kontribusi yang diberikan sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan.

1.4 Kegunaan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan bagi :

1. Masyarakat

Sebagai bahan informasi yang dapat digunakan untuk menambah wawasan tentang potensi perikanan.

2. Lembaga akademik dan non akademik

Sebagai bahan informasi ilmiah untuk diadakan penelitian lebih lanjut dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan potensi dan kontribusi perikanan.

3. Pemerintah

Sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan daerah melalui pengembangan potensi perikanan Kabupaten Pasuruan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya. Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan referensi untuk penelitian selanjutnya. Pertama, peneliti menggunakan acuan jurnal internasional dengan judul “Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Provinsi Bengkulu periode 2005-2008 adalah 29,86%. Artinya PAD Provinsi Bengkulu belum begitu berperan dalam pendapatan daerah. Hal ini berbeda dengan teori yang ada yang mengatakan bahwa PAD merupakan sumber keuangan terbesar bagi pendapatan daerah.

Kedua menggunakan acuan referensi dengan judul penelitian “Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Sektor Perikanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang Jawa Timur”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor perikanan di Kabupaten Jombang mempunyai nilai yang kecil jika dibandingkan dengan sektor lain yang ada di Kabupaten Jombang yaitu sebesar 0,000296% dari keseluruhan PAD Kabupaten Jombang. Dan sektor perikanan tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang.

Ketiga, peneliti menggunakan acuan referensi dengan judul penelitian “Analisis Potensi Atas Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa potensi pajak di Kabupaten Jepara terus mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Bila dibandingkan dengan perhitungan potensi potensi pajak hotel terhadap kontribusi yang diberikan terhadap Kabupaten Jepara dari tahun 2008-2012 dengan rata-

rata kontribusi poensi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jepara sebesar 4,14%, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan dihasilkan akan lebih banyak. Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, dapat diambil beberapa poin masalah, yaitu dengan memanfaatkan dan mengoptimalakan potensi yang ada di suatu daerah pada akhirnya akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.2 Sumber Daya Perikanan

Sumber daya perikanan termasuk kepada kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaruhi (*renewable source*). Meskipun demikian dalam pemanfaatan sumber daya ini harus rasional sebagai usaha untuk menjaga keseimbangan produksi dan kelestarian sumber daya. Hal ini perlu adanya penegasan karena sumber daya perikanan merupakan sumber daya milik bersama (*common property resources*) dalam artian hak properti atas sumber daya tersebut dipegang secara bersama-sama sehingga tidak ada larangan bagi siapapun untuk memanfaatkannya. Secara garis besar, sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan melalui penangkapan ikan (perikanan tangkap) dan budidaya ikan. Sehingga usaha perikanan merupakan semua kegiatan yang dilakukan secara perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil dan mendapatkan laba dari kegiatan yang dilakukan (Monintja, 2001).

Berdasarkan Undang-undang 45 Tahun 2009, Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun. Sedangkan pembudidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.

Menurut Ningsih (2005) sumber daya perikanan laut dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok besar yaitu: (1) sumber daya ikan demersal, yaitu jenis ikan yang hidup di atau dekat dasar perairan; (2) sumber daya ikan pelagis, yaitu jenis sumber daya ikan yang hidup di sekitar permukaan perairan; (3) sumber daya ikan pelagis besar, yaitu jenis ikan *oceanik* seperti tuna, cakalang, tenggiri dan lain-lain; (4) sumber daya udang dan biota laut non ikan lainnya seperti kuda laut.

2.3 Potensi Perikanan

Menurut Bravo (2009), potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah. Sebagai contoh, di pantai utara Pulau Jawa terdapat potensi angin dan sinar matahari, kedua potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi energi mekanik yang dapat digunakan untuk menggerakkan turbin, misalnya kincir angin bermanfaat menggerakkan generator untuk pembangkit tenaga listrik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010) potensi didefinisikan sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan dalam arti lain sama dengan kekuatan, kesanggupan, daya.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 Km dengan luas wilayah laut 5,4 juta Km². Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai Negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang cukup besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati

kelautan terbesar. Klasifikasi potensi tersebut pada umumnya dibedakan menjadi sumber daya terbarukan (re newable resources) seperti sumber daya perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), mangrove, terumbu karang, padang lamun, energi gelombang, pasang surut, angin dan OTEC (Ocean Thermd Energy Conversion); dan sumber daya tidak terbarukan (non-renewable resources), seperti sumber daya minyak dan gas bumi serta berbagai jenis mineral. Disamping itu terdapat potensi pengembangan untuk (a) perikanan tangkap di perairan umum, (b) budidaya laut terdiri dari budidaya ikan, budidaya moluska, dan budidaya rumput laut, (c) budidaya air payau (tambak), (d) budidaya air tawar, serta (e) bio teknologi kelautan untuk pengembangan industri bioteknologi (DKP Provinsi Banten, 2013).

2.4 Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah selama belum dimiliki oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mamesah, 1995). Kemudian Halim (2004), yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber pendapatan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai peraturan yang ditetapkan untuk meningkatkan kekayaan daerah. Selain itu, yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kriteria penting yang lain untuk mengetahui secara

nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Keuangan daerah juga memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, antara lain (Nataluddin, 2001):

1. Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah.,
2. Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.,
3. Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah dan,
4. Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

2.4.1 Otonomi Daerah

Penanganan kebijaksanaan untuk memperbesar dan memperkuat otonomi daerah dalam Negara kesatuan Republik Indonesia melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, merupakan langkah yang penting dan relevan mengingat

Pemerintah Daerah menempati posisi yang strategis dalam hubungannya dengan pelayanan publik atau pelayanan masyarakat.

Pengertian istilah otonomi dengan pemaknaan yang lebih terbatas dari etimologinya, dikemukakan oleh Sunindhia (1987) dalam Suparmoko (2002), yaitu kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Handoyo (2007) menjelaskan tentang otonomi daerah dengan mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 adalah masalah otonomi daerah, yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Kaho (2007) memberikan pengertian tentang otonomi daerah sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut, mula-mula otonomi atau berotonom berarti mempunyai peraturan sendiri atau mempunyai hak, kekuasaan kewenangan dan pengaturan legislative sendiri. Kemudian istilah otonomi ini berkembang menjadi pemerintah sendiri, dengan demikian otonomi daerah adalah daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut undang-undang Nimor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan konsep desentralisasi.

Ada beberapa asas penting dalam Undang-Undang otonomi daerah yang perlu dipahami, antara lain: (1) Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia. (2) Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. (3) Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten baik kota maupun Desa serta dari pemerintah Kabupaten Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. (4) Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Otonomi daerah akan memberikan dampak positif di bidang ekonomi bagi perekonomian daerah. Beberapa indikator ekonomi atas keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah: (1) Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) riil, sehingga pendapatan per kapita akan terdorong. (2) Terjadinya kecenderungan peningkatan investasi, baik investasi asing maupun domestik. (3) Kecenderungan semakin berkembangnya prospek

bisnis/usaha di daerah. (4) Adanya kecenderungan meningkatnya kreativitas pemda dan masyarakatnya.

2.4.2 Otonomi Keuangan Daerah

Berdasar Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan tentang wewenang pengelolaan pemerintahan daerah dilakukan berdasar asas dekonsentrasi, asas pembantuan dan desentralisasi. Asas dekonsentrasi adalah wewenang pengelolaan pembangunan daerah yang dimiliki oleh pemerintah pusat, tetapi telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah, sedangkan desentralisasi pada dasarnya adalah wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan pembanguinan di daerah sendiri. Sedangkan asas pembantuan adalah pemerintah daerah membantu melaksanakan tugas-tugas yang dimiliki pemerintah pusat di daerah, tetapi pembiayaannya ditanggung pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, berdasarkan Bab III pasal 155 Undang-undang no. 32 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah, berbunyi:

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dana atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Penyelenggaraan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara.
- (3) Administrasi pada pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

Prinsip dasar yang sering dipergunakan dalam menentukan besarnya keuangan dibutuhkan oleh suatu daerah otonom adalah prinsip dimana fungsi-

fungsi ditentukan terlebih dahulu, kemudian ditetapkan besarnya kebutuhan keuangan bagi pelaksanaan urusan yang bersangkutan.

Keuangan daerah yang menjadi hak daerah untuk menggunakannya sebagai dana pembangunannya tentunya tidak cukup kecuali pada daerah yang memiliki PAD yang cukup besar sehingga perlu ada bantuan dari pemerintah pusat, bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terbagi menjadi dua kelompok, pertama subsidi atau perimbangan keuangan daerah otonom, subsidi daerah otonom (SDO) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dimaksud untuk mengamankan pengeluaran rutin pemerintah daerah.

2.5 Sumber Penerimaan Daerah

Pendapatan Daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil bersumber dari Pajak dan sumber daya alam.

Pasal 157 tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, menyatakan bahwa Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut (PAD) yaitu:
 - a. hasil pajak daerah
 - b. hasil retribusi daerah
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - d. lain-lain PAD yang sah
2. Dana perimbangan dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah daerah memiliki otonomi tersendiri untuk melakukan dan menggunakan dana tersebut untuk pelaksanaan

pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan pasal 167 ayat (1) yang berbunyi “Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah”.

Menurut Yani (2002), menyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Dengan adanya sumber-sumber daerah yang berasal dari potensi daerah yang dikembangkan maka akan membuat pemerintah daerah berusaha untuk terus meningkatkan potensi yang ada di daerahnya. Sehingga pemerintah daerah dapat membiayai urusan rumah tangganya sendiri.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan daerah yang diterima pemerintah daerah dapat dengan leluasa digunakan untuk membiayai pembangunan daerah tentunya dengan persetujuan DPRD.

2.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.6.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Masing-masing daerah di negeri ini pada umumnya memiliki sumber pendapatan dalam upaya melakukan pembangunan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Yani (2002) berpendapat bahwa pendapatan merupakan penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan menurut Abdul Halim (2004), pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pengertian pendapatan menurut FA5B No 3 adalah aliran kas masuk atau penambahan aktiva suatu kesatuan usaha atau penyelesaian hutang (kombinasi dari keduanya) dari penyerahan atau produksi barang

penyerahan jasa atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama kesatuan usaha tersebut.

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari pungutan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Ketentuan mengenai pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam undang-undang nomor 25 tahun 1999 pasal 3 bagian yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari daerah dari sumber di wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Definisi di atas menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerima daerah yang berasal dari sumber-sumber penerima yang dipungut oleh lembaga pemerintah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan daerah digunakan untuk mendukung kemandirian pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sehingga

pemerintah daerah berusaha meningkatkan penerima daerah yang berasal dari potensi daerah yang dikelola dan dikembangkan dengan baik.

2.6.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah, daerah diharapkan mampu mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Untuk mengatur rumah tangganya, pemerintah daerah memerlukan sumber dana untuk membiayai kegiatan tersebut sehingga daerah perlu memiliki sumber pendapatan sendiri yang berasal dari potensi yang dimilikinya. Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sumber – sumber pendapatan asli daerah diungkapkan Basri (2006) adalah:

1. Hasil Pajak daerah Demokrasi lokal

yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parker, dll.

2. Hasil retribusi daerah

yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atau pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi Pelayanan Kesehatan, retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair, dan lain-lain.

3. Hasil perusahaan daerah
yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara atau BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain usaha daerah yang sah (seperti pinjaman keluar negeri atau pinjaman ke bank-bank)
yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan lain-lain.

Dari ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pendapatan Daerah itu ada empat sumber yang digali, dipungut, diawasi secara selektif oleh Pemerintah Daerah dan dalam hal ini telah menjadi kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undang yang sah.

Pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah, terdiri atas :

1. Sumbangan dari pemerintah
2. Sumbangan – sumbangan yang lain yang diatur dengan peraturan perundang - undangan.

2.7 Analisis Korelasi Potensi Perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu potensi kekayaan alam di Indonesia adalah berasal dari sektor perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Tidak dipungkiri lagi bahwa sektor perikanan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah di Indonesia karena seperti yang kita ketahui bahwa negara

Indonesia merupakan negara kelautan. Sektor perikanan di berbagai kota dinilai memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun pengaruhnya yaitu berupa pengaruh positif dan negatif pada beberapa bidang. Sektor perikanan memberikan kontribusi secara positif pada bidang ekonomi dan sosial. Dimana sektor perikanan dibagi menjadi dua yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Menurut Karl Person (2010), rumus yang dipergunakan untuk menghitung Koefisien Korelasi Sederhana adalah sebagai berikut : (Rumus ini disebut juga dengan Pearson Product Moment)

$$r = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Dimana :

- n = Banyaknya Pasangan data X dan Y
- $\sum x$ = Total Jumlah dari Variabel X
- $\sum y$ = Total Jumlah dari Variabel Y
- $\sum x^2$ = Kuadrat dari Total Jumlah Variabel X
- $\sum y^2$ = Kuadrat dari Total Jumlah Variabel Y
- $\sum xy$ = Hasil Perkalian dari Total Jumlah Variabel X dan Variabel Y

Pola atau Bentuk Hubungan antara 2 Variabel :

1. Korelasi Linear Positif (+1)

Perubahan salah satu Nilai Variabel diikuti perubahan Nilai Variabel yang lainnya secara teratur dengan arah yang sama. Jika Nilai Variabel X mengalami kenaikan, maka Variabel Y akan ikut naik. Jika Nilai Variabel X mengalami penurunan, maka Variabel Y akan ikut turun.

Apabila Nilai Koefisien Korelasi mendekati +1 (positif Satu) berarti pasangan data Variabel X dan Variabel Y memiliki Korelasi Linear Positif yang kuat atau erat.

2. Korelasi Linear Negatif (-1)

Perubahan salah satu Nilai Variabel diikuti perubahan Nilai Variabel yang lainnya secara teratur dengan arah yang berlawanan. Jika Nilai Variabel X mengalami kenaikan, maka Variabel Y akan turun. Jika Nilai Variabel X mengalami penurunan, maka Nilai Variabel Y akan naik.

Apabila Nilai Koefisien Korelasi mendekati -1 (Negatif Satu) maka hal ini menunjukkan pasangan data Variabel X dan Variabel Y memiliki Korelasi Linear Negatif yang kuat atau erat.

3. Tidak Berkorelasi (0)

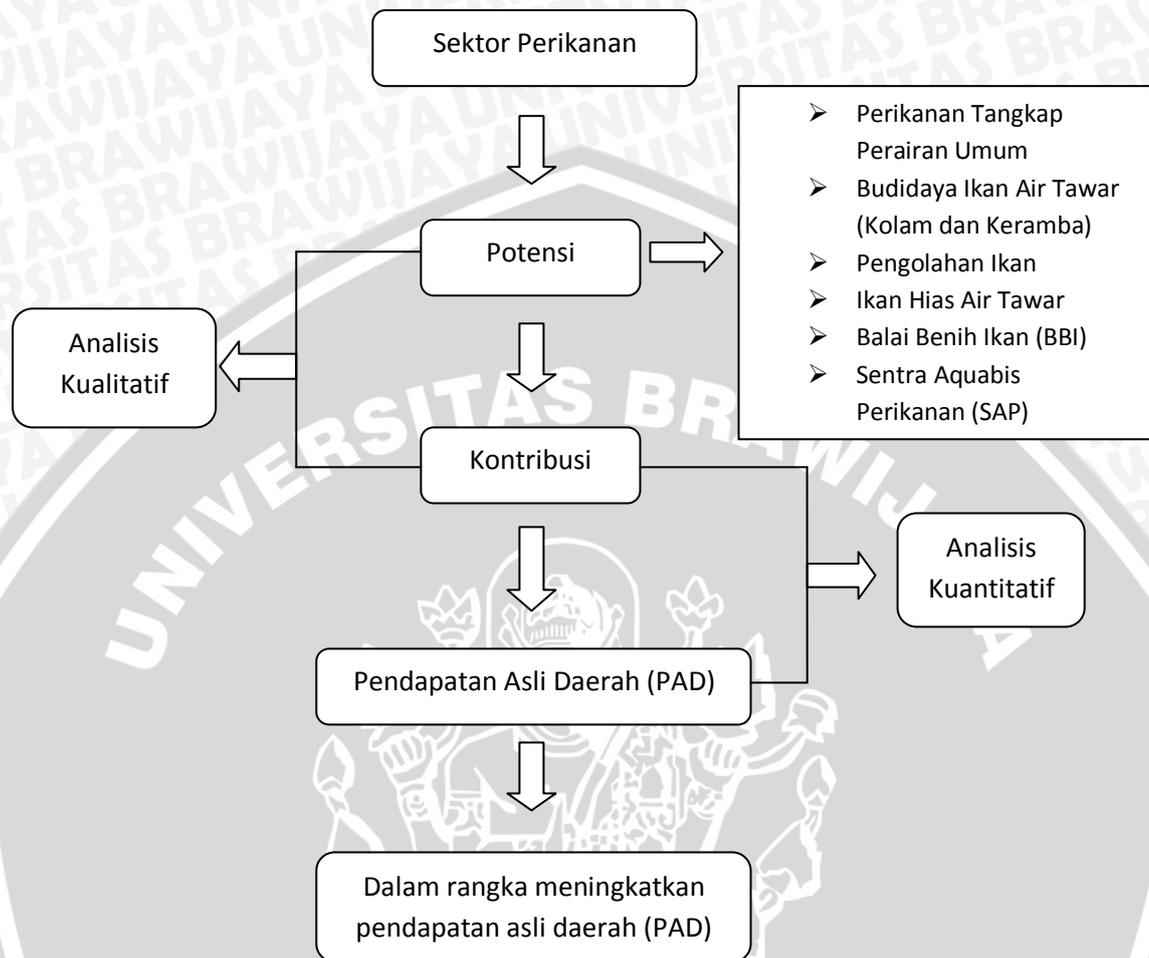
Kenaikan Nilai Variabel yang satunya kadang-kadang diikuti dengan penurunan Variabel lainnya atau kadang-kadang diikuti dengan kenaikan Variable yang lainnya. Arah hubungannya tidak teratur, kadang-kadang searah, kadang-kadang berlawanan.

Apabila Nilai Koefisien Korelasi mendekati 0 (Nol) berarti pasangan data Variabel X dan Variabel Y memiliki korelasi yang sangat lemah atau berkemungkinan tidak berkorelasi.

Berikut tabel tentang Pedoman umum dalam menentukan Kriteria Korelasi

R	Kriteria Hubungan
0	Tidak ada Korelasi
0 – 0.5	Korelasi Lemah
0.5 – 0.8	Korelasi sedang
0.8 – 1	Korelasi Kuat / erat
1	Korelasi Sempurna

2.8 Kerangka Berpikir



Sektor perikanan di Kabupaten Pasuruan memiliki potensi dalam memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi Kelautan dan Perikanan yang terdapat di Kabupaten Pasuruan meliputi wilayah perairan laut yang terbentang sepanjang ± 48 km mulai dari kecamatan Nguling sampai Bangil. Yang terdiri atas kawasan danau, perikanan air tawar dan perikanan air payau yang sangat potensial untuk dikembangkan Sektor usaha perikanan di wilayah Kabupaten Pasuruan meliputi budidaya tambak, budidaya kolam, penangkapan ikan di laut. Produksi dari sektor perikanan adalah komoditi Udang (Udang Windu dan Udang Vannamei) dan Kepiting. Klasifikasi potensi perikanan pada umumnya dibedakan menjadi sumber daya terbarukan (re newable

resources) seperti sumber daya perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), mangrove, terumbu karang, padang lamun, energi gelombang, pasang surut, angin dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion); dan sumber daya tidak terbarukan (non-renewable resources), seperti sumber daya minyak dan gas bumi serta berbagai jenis mineral.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah yaitu berupa kontribusi. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi yang diberikan oleh sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan analisis kualitatif dengan rumus :

$$\text{Kontribusi } x = \frac{\text{jumlah pendapatan } x}{\text{jumlah pendapatan keseluruhan}} \times 100\%$$

Kontribusi yang dimaksud adalah kontribusi sektor perikanan yang diperoleh dari jumlah pendapatan sektor perikanan dibagi dengan jumlah pendapatan keseluruhan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikali dengan 100% sehingga diperoleh hasil kontribusi perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk persen.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2014 berlokasi di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Menurut Whitney dalam Nazir (2003), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat yang kemudian digambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat erat hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Metode deskriptif pada penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif kuantitatif yaitu suatu analisa yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan

data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan di tekankan pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2007) dalam Sugiyono (2003). Sedangkan analisa deskriptif kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan bersifat kualitatif. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu (Usman dan Akbar, 2006).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

3.3.1 Data Sekunder

Data sekunder menurut Budianto (2012) yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara tidak langsung kepada objek penelitian. Data yang diperoleh adalah data yang disajikan oleh pihak-pihak lain. Data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran hasil studi sebelumnya serta data statistik dengan melakukan survei institusional. Institusi yang dituju untuk mendukung penelitian ini adalah institusi yang membawahi beberapa bidang yang terkait dengan tujuan penelitian seperti pemerintah setempat.

Sumber sekunder berisi data dari tangan kedua atau dari tangan kesekian yang baik penyidik tidak mungkin berisi data yang seasli sumber data primer. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2008). Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer misalnya dari dokumen-dokumen yang ada di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasuruan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pasuruan, literature, homepage yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan data dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2012) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam rangka pengumpulan data guna melengkapi dan menunjang validitas data digunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Rianse dan Abdi (2009), observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalannya (reliabilitas) dan validitasnya. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti.

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif pasif. Menurut Sugiyono (2013) observasi partisipatif pasif dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk mengetahui potensi sektor perikanan di Kabupaten Pasuruan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang yang berhubungan dengan pebnulisan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dokumen yang didapati dari lokasi penelitian, kemudian dokumen

tersebut dipelajari dan apabila memiliki keterkaitan dengan yang diteliti maka dokumen tersebut dimasukkan ke dalam hasil penelitian.

3. Studi Kepustakaan

Studi pustaka (*desk study*) merupakan suatu metode pengumpulan data berupa laporan-laporan studi terdahulu, paper atau makalah, serta data sekunder yang dibutuhkan dalam mendesain riset, serta menganalisis hasil studi (Kusuma, 2010 dalam Ning, 2013).

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan. Ketetapan-ketetapan buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Studi pustaka digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, literatur dari internet, laporan tahunan dari dinas yang terkait seperti Dinas Pendapatan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Badan Pusat Statistik yang terkait dalam pengelolaan sumber daya pesisir di Kabupaten Pasuruan.

3.5 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif terkait dengan potensi sektor perikanan di Kabupaten Pasuruan, kontribusi sektor perikanan terhadap PAD Kabupaten Pasuruan.

1. Potensi Sektor Perikanan di Kabupaten Pasuruan

Untuk menjawab tujuan pertama yaitu mempelajari dan menganalisis potensi sektor perikanan di Kabupaten Pasuruan dengan bantuan tabel variabel potensi perikanan sebagai berikut :

Tabel 1. Variabel untuk menganalisis potensi sektor perikanan di Kabupaten Pasuruan

No.	Variabel Potensi Perikanan	Fakta	Ideal
1	Perikanan Tankap Perairan Umum		
2	Budidaya Ikan Air Tawar - kolam - keramba		
3	Sarana Produksi - benih - pakan		
4	Jenis Alat Tangkap		
5	Air - sumber air - debit air		
6	Tanah - keadaan tanah - letak geografis tanah		
7	Industri Pengolahan		
8	Distribusi Pemasaran Hasil Perikanan		
9	Tingkat Konsumsi Ikan		
10	Sumber Daya Manusia		

Tabel ini digunakan dalam membantu menganalisis semua potensi sektor perikanan yang ada di Kabupaten Pasuruan sesuai dengan variabel –variabel potensi perikanan.

2. Hubungan antara sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan

Untuk menjawab tujuan kedua yaitu menganalisis pengaruh antara sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan digunakan analisis Korelasi. Menurut Setiawan dan Kusri (2010), rumus korelasi adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Dimana :

- n = Banyaknya Pasangan data X dan Y
- $\sum x$ = Total Jumlah dari Variabel X
- $\sum y$ = Total Jumlah dari Variabel Y
- $\sum x^2$ = Kuadrat dari Total Jumlah Variabel X
- $\sum y^2$ = Kuadrat dari Total Jumlah Variabel Y
- $\sum xy$ = Hasil Perkalian dari Total Jumlah Variabel X dan Variabel Y

Berikut tabel tentang Pedoman umum dalam menentukan Kriteria Korelasi

R	Kriteria Hubungan
0	Tidak ada Korelasi
0 – 0.5	Korelasi Lemah
0.5 – 0.8	Korelasi sedang
0.8 – 1	Korelasi Kuat / erat
1	Korelasi Sempurna

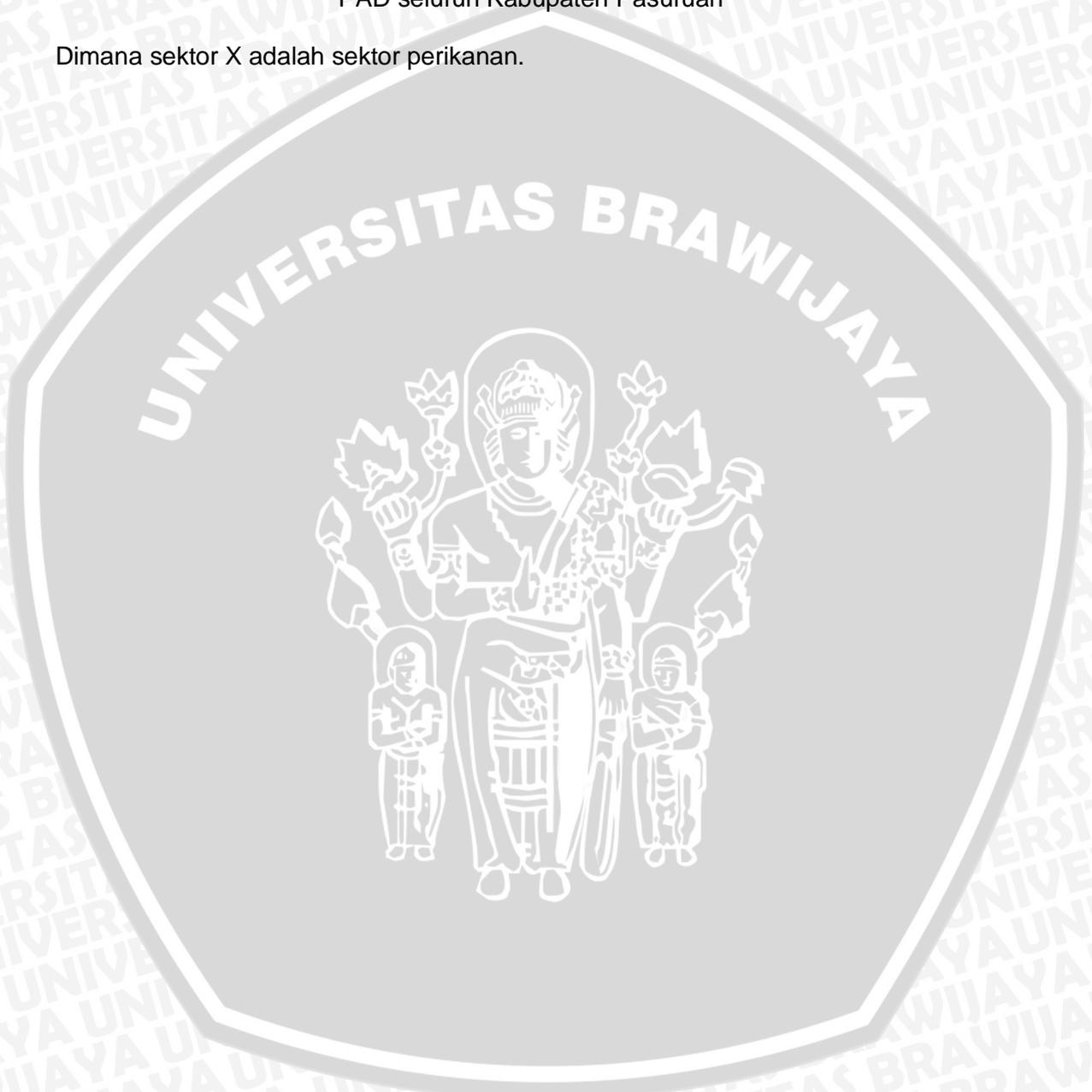
3. Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PAD Kabupaten Pasuruan

Untuk menjawab tujuan ketiga digunakan rumus :

PAD sektor X (Rp)

$$\text{Kontribusi sektor X} = \frac{\text{PAD sektor X}}{\text{PAD seluruh Kabupaten Pasuruan}} \times 100\%$$

Dimana sektor X adalah sektor perikanan.



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kaeadaan Umum Daerah Penelitian

4.1.1 Letak Geografis dan Topografis Kabupaten Pasuruan

Kabupaten Pasuruan secara geografis terletak antara $112^{\circ}33'55''$ hingga $113^{\circ}05'37''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ}32'34''$ hingga $7^{\circ}57'20''$ Lintang Selatan, merupakan kawasan segitiga emas karena terletak pada poros distribusi ekonomi 3 kawasan, yaitu jalur Surabaya – Jember/Banyuwangi/Bali, Surabaya - Malang dan Malang – Jember/Banyuwangi/Bali. Dengan luas wilayah sebesar $\pm 147.401,50$ ha.

Batas administratif wilayah Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kota Pasuruan, Selat Madura dan Kabupaten Sidoarjo
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Lumajang
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Malang

Secara topografis, Kabupaten Pasuruan dibagi menjadi :

- 1) Wilayah pantai dengan ketinggian 0 – 12,5 mdpl seluas 18.819,04 ha atau 12,77% dari luas wilayah. Wilayah ini sesuai untuk pengembangan usaha perikanan dan pertambakan, dengan lokasi penyebaran pada kecamatan Gempol, Beji, Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gondang Wetan, Rejoso, Winongan, Grati, Lekok, Nguling.
- 2) Wilayah dataran rendah dengan ketinggian 12,5 – 500 mdpl seluas 80.169,44 ha atau 54,39% dari luas wilayah, tepat difungsikan untuk kawasan pertanian tanaman pangan dan semusim serta untuk pengembangan perkotaan dan pedesaan, meliputi kecamatan Purwodadi, Tutur, Tosari, Lumbang, Puspo, Pasrepan, Kejayan, Wonorwojo, Prigen,

Pandaan, Sukorejo, Gempol, Beji, Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Rejoso, Gondang Wetan, Grati, Lekok, Winongan, dan Nguling.

- 3) Wilayah perbukitan dengan ketinggian 500 – 1000 mdpl seluas 21.877,17 ha atau 14,84% dari luas wilayah. Peruntukannya sesuai untuk tanaman keras/tahunan dan sebagai penyangga bagi kawasan perlindungan tanah dan air serta untuk lahan pertanian tanaman pangan dengan sistem terasering. Meliputi kecamatan Purwodadi, Tukur, Tosari, Lumbang, Puspo, Purwosari, Prigen, Gempol, dan Pasrepan.
- 4) Wilayah pegunungan dengan ketinggian 1000 -2000 mdpl seluas 18.615,08 ha atau 12,63% dari luas wilayah berfungsi sebagai kawasan penyangga untuk perlindungan tanah dan air, meliputi kawasan kecamatan Purwodadi, Tukur, Tosari, Lumbang, Puspo, Purwosari, dan Prigen.
- 5) Wilayah dengan ketinggian > 2000 mdpl seluas 7.920,77 ha atau sekitar 5,37% dari luas wilayah, dengan peruntukan sebagai hutan lindung yang berfungsi untuk melindungi kawasan bawahannya, tersebar pada kecamatan Purwodadi, Tukur, Tosari, Lumbang, Puspo, purwosari, dan Prigen.

4.1.2 Pemerintahan Daerah

Secara administrasi Kabupaten Pasuruan terbagi menjadi 24 kecamatan yang terdiri dari 341 desa dan 24 kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas yaitu Kecamatan Lumbang dengan luas 125,550 ha, Kecamatan Prigen 121,900 ha dan Kecamatan Purwodadi dengan luas 102,455 ha.

Pada tahun 2013 jumlah aparatur pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan sebanyak 12.740 orang yang dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Aparatur Pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	S1	7.250	56,9
2.	D1, D2, D3/ Akademi	2.502	19,6
3.	SLTA	2.186	17,2
4.	SLTP	584	4,6
5.	SD	218	1,7
Total		12.740	100

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka, 2013

4.1.3 Kependudukan dan Tenaga Kerja

Penduduk merupakan suatu obyek dan subyek dalam pembangunan. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan sampai akhir tahun 2013 sebanyak 1.556.700 jiwa yang dapat dilihat pada Tabel 3.



Tabel 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2013

No.	Kecamatan	Laki – Laki	Perempuan	Total
1.	Purwodadi	33,459	33,480	66,939
2.	Tutur	26,299	26,311	52,610
3.	Puspo	13,448	14,062	27,510
4.	Tosari	9,267	9,479	18,746
5.	Lumbang	16,371	16,928	33,299
6.	Pasrepan	24,777	26,173	50,950
7.	Kejayan	30,862	33,206	64,068
8.	Wonorejo	27,997	29,691	57,688
9.	Purwosari	40,130	40,398	80,528
10.	Prigen	42,315	42,143	84,458
11.	Sukorejo	41,780	42,198	83,978
12.	Pandaan	54,391	55,604	109,995
13.	Gempol	64,362	63,968	128,330
14.	Beji	40,059	40,610	80,669
15.	Bangil	41,972	44,382	86,354
16.	Rembang	30,698	32,103	62,801
17.	Kraton	46,162	45,785	91,947
18.	Pohjentrek	14,643	14,471	29,114
19.	Gondangwetan	27,244	28,126	55,370
20.	Rejoso	22,629	22,657	45,286
21.	Winongan	20,878	21,139	42,017
22.	Grati	37,377	38,117	75,494
23.	Lekok	35,660	37,565	73,225
24.	Nguling	26,920	28,404	55,324
	Kab. Pasuruan	769,700	787,000	1,556,700

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Gempol, Pandaan, dan Kraton, sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Tosari, Puspo, dan Pohjentrek.

Jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2013 mencapai 756.445 atau meningkat sebesar 1,10% jika dibandingkan dengan tahun 2012. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2013 adalah 94,97% sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2013 adalah 5,03%. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan tetap berupaya meningkatkan kinerja pada bidang ketenagakerjaan. Upaya yang akan dilakukan selain peningkatan investasi dan penanaman modal utamanya pada sektor padat karya, akan diupayakan pula pengembangan sektor usaha UKM dan usaha internal, serta peningkatan kualitas para calon tenaga kerja melalui pembinaan dan bimbingan pada balai latihan kerja baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun institusi lain yang peduli terhadap para calon pekerja.

4.1.4 Keadaan Umum Perikanan

Wilayah Kabupaten Pasuruan secara geografis terdiri dari pegunungan, dataran rendah dan kawasan pantai. Sebagian dari wilayah tersebut mempunyai sumberdaya alam yang potensial untuk pengembangan usaha perikanan. Potensi Kelautan dan Perikanan yang terdapat di Kabupaten Pasuruan meliputi wilayah perairan laut yang terbentang sepanjang \pm 48 km mulai dari kecamatan Nguling sampai Bangil. Yang terdiri atas kawasan danau, perikanan air tawar dan perikanan air payau yang sangat potensial untuk dikembangkan.

Kegiatan utama usaha perikanan adalah penangkapan ikan di laut dan budidaya di tambak. Kedua usaha tersebut memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan produksi perikanan. Pelaksanaan pembangunan sub sektor perikanan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat dengan harga murah, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan /nelayan dalam rangka pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, serta mendorong pertumbuhan sub sektor lainnya.

Sektor usaha perikanan di wilayah Kabupaten Pasuruan meliputi budidaya tambak, budidaya kolam, penangkapan ikan di laut. Produksi dari sektor perikanan adalah komoditi Udang (Udang Windu dan Udang Vannamei) dan Kepiting. Luas wilayah perikanan untuk budidaya udang sekitar 3.966,9 Ha yang meliputi kecamatan Bangil, Kraton, Rejoso serta Lekok. Budidaya rumput laut juga dikembangkan di kecamatan Bangil, Kraton, Rejoso serta Lekok dengan luas pantai sekitar 225 Ha. Sedangkan untuk potensi ikan air tawar, mulai dikembangkan oleh masyarakat dengan sistem budidaya keramba jaring apung di Danau Ranu Grati dengan luas keramba sekitar 3,5 Ha serta sistem pemetaan kolam, seperti misalnya ikan lele dan patin di kecamatan Beji. Dari sektor perikanan tangkap menghasilkan potensi lestari 49,51 ribu ton ikan per tahun.

Jenis usaha perikanan yang terdapat di Kabupaten Pasuruan terdiri dari: usaha budidaya dan usaha penangkapan yang dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Jenis Usaha Perikanan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2013

No.	Jenis Usaha	Jumlah Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp.1000)
1.	Penangkapan	7.807,3	82.393.172,2
2.	Budidaya	14.124,96	263.583.954

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasuruan,2013

Dari tabel jenis usaha perikanan di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat bahwa budidaya menghasilkan jumlah produksi paling besar. Menurut Laporan Akhir Tahun Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasuruan (2013), besarnya produksi budidaya ini dikarenakan adanya upaya pengembangan usaha perikanan air tawar dan air payau di beberapa wilayah kecamatan yang

potensial, baik melalui ekstensifikasi, intensifikasi usaha maupun diversifikasi komoditi, juga adanya peningkatan penerapan teknologi tepat guna.

4.2. Potensi Sektor Perikanan di Kabupaten Pasuruan

Sektor perikanan di Kabupaten Pasuruan sangat potensial untuk dikembangkan. Perkembangan budidaya perikanan yang cukup baik ditandai dengan peningkatan produksi setiap tahun dan jumlah produksi yang mencapai 100,55% dari target yang ditetapkan. Kabupaten Pasuruan juga memiliki kawasan danau, perikanan air tawar dan perikanan air payau yang sangat potensial untuk dikembangkan. Komoditi unggulan Kabupaten Pasuruan adalah komoditi Udang (Udang Windu dan Udang Vannamei) dan Kepiting.

4.2.1. Penangkapan di Perairan Umum

Potensi sektor perikanan Kabupaten Pasuruan pada perairan umum terdiri dari sungai, waduk, danau dan rawa dengan potensi produksi mencapai 173,2 ton pada tahun 2013 yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Potensi Perairan Umum di Kabupaten Pasuruan Tahun 2013

No.	Jenis Perairan	Luas / Panjang	Jumlah Produksi (Ton)
1.	Sungai	126 km ²	55,2
2.	Waduk	25,98 Ha	-
3.	Danau	198 Ha	118,0
4.	Rawa	8 Ha	-

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasuruan, 2013

Dari tabel potensi perairan umum di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat bahwa sungai adalah 126 km², luas waduk adalah 25,98 Ha, luas danau adalah 198 Ha dan luas rawa adalah 8 Ha. Dari semua jenis perairan umum yang ada di Kabupaten Pasuruan, yang digunakan sebagai usaha budidaya perikanan hanya sungai, dan danau sedangkan waduk dan rawa sudah tidak berproduksi lagi. Hal

ini dikarenakan waduk di Kabupaten Pasuruan sudah kering sehingga tidak dapat menghasilkan produksi lagi. Hasil produksi usaha perikanan di perairan umum dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Produksi Penangkapan di Perairan Umum Tahun 2013

Jenis Perairan	Jumlah Produksi (ton)	Nilai Produksi (Rp.1000)
Sungai	55,2	1.113.866
Danau	118,0	-
Waduk	-	175.112
Rawa	-	121.694
Jumlah	173,2	1.410.671,2

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasuruan,2013

Dari tabel hasil produksi penangkapan di perairan umum dapat dilihat bahwa jumlah produksi terbesar ada pada perairan danau dengan nilai produksi terbesar ada pada perairan sungai. Sehingga dengan total produksi pada penangkapan di perairan umum sebesar 173,2 ton dapat menghasilkan nilai produksi sebesar 1.410.671,2 (satuan Rp.1000).

Budidaya perikanan di perairan umum dilakukan saat musim penghujan, yaitu bulan Februari sampai Maret. Hal ini dilakukan karena pada bulan tersebut air sungai dan danau dalam keadaan bagus, airnya tenang dan dalam jumlah yang banyak. Ikan – ikan hasil penangkapan di perairan umum meliputi : ikan kakap merah, bandeng, nila, lele, bawal tawar, patin, nila, mujair, gurame dan uadang galah. Selain itu terdapat Rumah Tangga Perikanan (RTP) perairan umum sebanyak 151 keluarga dan jumlah nelayan perairan umum sebanyak 65 orang. Alat tangkap yang digunakan dalam usaha penangkapan perairan umum di Kabupaten Pasuruan yaitu pancing.

4.2.2. Penangkapan Laut

Potensi sektor perikanan Kabupaten Pasuruan pada penangkapan laut dapat dikatakan sangat potensial untuk dikembangkan dengan produksi sebesar 7.634,1 ton pada tahun 2013. Hasil produksi dan nilai produksi pada penangkapan laut dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8.

Tabel 7. Produksi Perikanan Penangkapan Laut Tahun 2013

No.	Kuartal	Jumlah Produksi (Ton)
1.	Kuartal I	841,1
2.	Kuartal II	660,2
3.	Kuartal III	2.261,6
4.	Kuartal IV	3.871,2
Jumlah		7.634,1

Sumber : Statistik Penangkapan Jawa Timur Tahun 2013

Tabel 8. Nilai Produksi Perikanan Penangkapan Laut Tahun 2013

No.	Kuartal	Nilai Produksi (xRp.1000)
1.	Kuartal I	6.993.417,3
2.	Kuartal II	6.762.605,8
3.	Kuarta III	25.664.392,4
4.	Kuartal IV	41.562.085,5
Jumlah		80.982.501,0

Sumber : Statistik Penangkapan Jawa Timur Tahun 2013

Sedangkan hasil produksi pada penangkapan laut berdasarkan jenis ikan di dapat sebesar 6.417,9 ton dengan nilai produksi sebesar 62.772.107,2 (satuan Rp.1000). Ikan – ikan hasil pengkapan di laut meliputi : ikan manyung, sebelah, ekor kuning, selar, bawal hitam, bawal putih, kakap, golok-golok, tembang lemuru, beloso, lidah, teri, peperek, ikan merah, belanak, kuniran, kurisi, gulamah, tongkol krai, cakalang, kembung, kenyar, tengiri, kerapu lumpur, baronang, kerong-kerong, layur, cucut tikus.

4.2.3. Budidaya Air Tawar

Usaha budidaya perikanan air tawar di Kabupaten Pasuruan meliputi tambak, kolam dan keramba. Potensi luas lahan perikanan budidaya air tawar yang digunakan di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada Tabel 9. Sedangkan Hasil produksi perikanan budidaya air tawar dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 9. Potensi Luas Lahan Perikanan Budidaya Air Tawar yang digunakan di Kabupaten Pasuruan

No.	Budidaya	Luas (Ha)
1.	Tambak	3.966,90
2.	Kolam	52,50
3.	Keramba	40,98
Jumlah		4.060,38

Sumber : Statistik Penangkapan Jawa Timur Tahun 2013

Tabel 10. Hasil Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar di Kabupaten Pasuruan

No.	Budidaya	Jumlah Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp.1000)
1.	Tambak	11.323,93	228.504.155
2.	Kolam	1.689,16	20.183.311
3.	Keramba	1.111,87	14.896.488,4
Jumlah		14.124,96	263.583.954

Sumber : Statistik Penangkapan Jawa Timur Tahun 2013

Jenis ikan yang dominan dibudidayakan adalah lele, nila, tombro, gurame, patin, bawal, mujaer dan udang galah dengan total jumlah produksi perikanan tawar mencapai 14.124,96 ton.

Sentra pembudidaya komoditi ikan air tawar yang dipetakan berdasarkan Kecamatan yaitu lele di Kecamatan Beji; bawal tawar di Kecamatan Gempol; Patin di kecamatan Grati dan Beji; Nila dan mujaer di kecamatan Grati dan Winongan; Gurame di kecamatan Lekok, Rejoso dan Rembang; Udang Galah di kecamatan Pandaan. Akhir-akhir ini dikembangkan jenis ikan patin dan bawal tawar yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dengan teknologi budidaya yang relatif mudah. Potensi yang saat ini cukup besar di sektor perikanan budidaya air tawar Kabupaten Pasuruan yaitu budidaya udang galah. Udang galah menjadi

salah satu komoditas unggulan yang dikembangkan di Desa Duren Sewu Kecamatan Pandaan.

a. Budidaya Tambak

Budidaya ikan air tawar di tambak dengan luas lahan 3.966,90 Ha. Jenis ikan yang dibudidayakan antara lain mujaer, bandeng, nila, dan ikan lainnya dengan jumlah produksi mencapai 11.323,93 ton.

b. Budidaya Kolam

Budidaya ikan air tawar di kolam tersebar di 19 Kecamatan dengan luas lahan 52,50 Ha. Jenis ikan yang dibudidayakan antara lain ikan mas, nila, mujair, gurami, tawes, patin, lele, sidat, dan bawal dengan jumlah produksi mencapai 1.689,16 ton. Untuk memenuhi kebutuhan benih ikan terdapat UPR (Unit Pembenihan Rakyat). Selain itu juga dibangun Balai Benih Ikan (BBI) yang telah beroperasi saat ini. Budidaya ikan air tawar juga berfungsi untuk meningkatkan pendapatan dan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai usaha sambilan rumah tangga. Difersifikasi usaha juga dilakukan dengan mengembangkan budidaya ikan hias seperti ikan koki, koi, black moly dan red fin.

b. Budidaya Keramba

Budidaya jaring apung di Kabupaten Pasuruan selama ini telah dilakukan di Kecamatan Beji dan Grati. Danau Ranu Grati dengan luasan kurang lebih 40,98 Ha potensial untuk pengembangan usaha ikan di karamba jaring apung. Luas budidaya di karamba jaring apung saat ini mencapai 40,98 Ha (2 persen dari luas danau Ranu Grati) dengan jumlah pembudidaya sebanyak 286 RTP. Produksi yang dihasilkan dari usaha tersebut sebesar 1.111,87 ton. Jenis ikan yang banyak dibudidayakan adalah mas, nila, gurami, tawes, patin, lele, dan bawal dengan komoditi andalan ikan nila. Selain nila saat ini juga dikembangkan jenis ikan bandeng tawar, bawal, patin serta lele.

Saat ini penambahan unit karamba jaring apung dikendalikan dengan cukup ketat. Hal ini dilakukan sebagai upaya mempertahankan daya dukung lingkungan Ranu Grati sebagai tempat pariwisata dan kegiatan usaha perikanan, sehingga kepada para pembudidaya ikan karamba disarankan untuk melakukan intensifikasi usaha dan diversifikasi komoditi sebagai langkah peningkatan usahanya. Pengembangan budidaya ikan di karamba jaring juga sedang dikembangkan di rawa bekas galian pasir yang berada di Desa Kedungboto Kecamatan Beji. Dengan luas usaha budidaya sebesar \pm 8 Ha dan jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan lele serta nila.

4.2.4. Sumber Air

Sumber air yang digunakan dalam usaha perikanan di Kabupaten Pasuruan berasal dari sejumlah mata air, danau dan sungai. Selain itu Kabupaten Pasuruan mempunyai potensi air cukup besar berupa air permukaan maupun air tanah, oleh karena itu disamping sistem aliran sungai, di Kabupaten Pasuruan terdapat danau atau waduk alami cukup besar dan sejumlah mata air, seperti terlihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Jumlah Sumber Air dan Debit yang Dapat Dimanfaatkan

No.	Kecamatan	Jumlah Sumber	Debit Total	
			Maksimum (1/dt)	Minimum (1/dt)
1	Prigen	59	955.0	510.0
2	Pandaan	10	401.0	305.0
3	Gempol	12	275.0	169.8
4	Beji	22	371.0	205.0
5	Bangil	3	130.0	105.0
6	Rembang	14	687.0	479.0
7	Sukorejo	13	295.0	136.0
8	Purwosari	24	684.0	358.0
9	Purwodadi	29	417.0	211.0
10	Kraton	1	30.0	15.0
11	Tutur	7	181.0	46.0
Jumlah			4426.0	2539.8

Sumber : RT/RW Kabupaten Pasuruan, 2013

Di samping sumber-sumber tersebut di atas, Kabupaten Pasuruan juga masih mempunyai potensi air tanah dalam yang dapat dikatakan cukup baik. Air tanah dalam ini dimanfaatkan untuk air minum dan air irigasi dengan menggunakan sumur bor, dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Potensi Sumur Bor dan Lokasinya

No	Kecamatan	Kapasitas Sumur
1.	Wonorejo, Kraton, Kejayan, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso	> 40 l/dtk
2.	Wonorejo, Winongan, Grati, Lekok, Nguling, Kraton, Kejayan, Pohjentrek, Gondangwetan, Pasrepan	20 – 40 l/dtk
3.	Wonorejo, Winongan, Grati, Nguling, Kraton, Kejayan, Lekok, Pasrepan, Rejoso	10 – 20 l/dtk
4.	Wonorejo, Winongan, Lumbang, Nguling, Lekok, Kejayan, Pasrepan	2,50 – 10 l/dtk
5..	Lumbang, Lekok, Nguling, Kejayan, Pohjentrek, Pasrepan, Tutur, Tosari, Puspo	2,50 l/dtk
6.	Lekok, Nguling, Kraton, Rejoso	Ada potensi air tanah tetapi kualitasnya tidak layak untuk air bersih

Sumber : RTRW Kabupaten Pasuruan, 2006

Sumber air tanah secara umum sangat melimpah, hal ini ditandai oleh adanya beberapa mata air yang memiliki debit cukup besar, antara lain mata air Umbulan debit airnya mencapai 4.500 l/dtk (diperkirakan pada penghitungan maksimal), Banyu Biru debitnya > 500 l/dtk dan lain-lainnya.

4.2.5. Keadaan Tanah

Tanah merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan usaha budidaya ikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasuruan, jenis tanah yang di pakai dalam usaha budidaya ikan di Kabupaten Pasuruan mayoritas jenis tanah hidromorfik kelabu. Menurut Susanto (2008), jenis tanah yang sangat baik digunakan untuk lahan potensial

budidaya ikan adalah jenis tanah dengan tekstur lempung liat sedikit berpasir (*sandy loam*), seperti jenis tanah glei dan alluvial.

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan dalam 6 kelompok besar yaitu alluvial, regosol, andasol, grumosol, mediteran dan latosol. Jenis tanah alluvial (secara harfiah berarti endapan) ini hanya mungkin terbentuk di daerah yang sering atau baru saja mengalami banjir. Tanah jenis ini masih muda riwayat umurnya hingga morfologinya belum menampakkan lapisan-lapisan memanjang hasil perkembangan tanah seturut waktu (sering disebut diferensiasi horison). Hal yang khas pada pembentukan tanah aluvial ialah bagian terbesar bahan kasar akan diendapkan tidak jauh dari sumbernya, makin jauh dari sumbernya makin halus butir yang diangkut. Karena tanah alluvial terbentuk akibat banjir, maka sifat bahan-bahannya juga tergantung pada kekuatan banjir, asal serta macam bahan yang diangkut, sehingga menampakkan ciri morfologi berlapis yang bukan horison karena bukan hasil perkembangan tanah.

Tanah hidromorfik kelabu, dengan daerah penyebaran terbatas di sepanjang pesisir pantai. Tanah jenis ini terbentuk dari bahan induk campuran endapan baru dari sungai dan laut. Dalam keadaan basah ia mengembang dan lengket, sebaliknya ketika kering ia jadi berkerut, bercelah dan keras. Keasaman tanah netral sampai mendekati basa. Kadar hara N, F, K, Ca dan Mg cukup tinggi namun kadar Na dan Cl juga tinggi. Jadi sebenarnya ini tidak sesuai untuk lahan pertanian. Tanah ini lebih sesuai untuk budidaya tambak dan ladang garam.

4.2.6. Pengolahan Ikan

Kegiatan usaha budidaya perikanan di kabupaten Pasuruan memiliki potensi yang cukup untuk dikembangkan sebagai usaha agribisnis. Saat ini pembudidaya ikan terus bertambah setiap tahunnya sehingga hasil produksi

perikanan terus mengalami peningkatan. Untuk menjaga keseimbangan jumlah produksi dan kemampuan daya serap konsumen di pasaran maka perlu dilakukan kegiatan yang menunjang akses pasar, antara lain dengan melakukan kegiatan produk olahan ikan sehingga konsumen tidak merasa jenuh.

Usaha pengolahan ikan yang terdapat di wilayah Kabupaten Pasuruan terdiri dari usaha pengolahan ikan tradisional sebanyak ± 1.411 RTP, pedagang ikan sebanyak ± 701 RTP, pedagang non konsumsi ± 42 RTP, dan modern sebanyak 26 unit perusahaan. Hasil pengolahan ikan tradisional meliputi pemindangan, pengeringan/pengasinan, pengasapan, pembuatan terasi, penges-an. Sedangkan unit usaha pengolahan yang modern meliputi pengalengan, pembekuan (*coldstorage*), pembuatan krupuk ikan/udang dan *frozen foods*.

4.2.7. Ikan Hias Air Tawar

Kabupaten Pasuruan juga memiliki potensi jenis ikan ekonomis seperti gapi, cupang, koi, maskoki, plati, komet yang dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13. Hasil Produksi Ikan Hias di Kabupaten Pasuruan Tahun 2013

No.	Jenis Ikan	Produksi (satuan 1000 ekor)	Nilai Produksi (satuan Rp.1000)
1.	Gapi	132,21	19.831,90
2.	Cupang	210,40	31.560,00
3.	Koi	841,91	1.262.865,00
4.	Maskoki	79,21	2.387,50
5.	Plati	19,68	36.862,96
6.	Komet	284,31	36.862,96
7.	Ikan lainnya	418,90	216.950,00
Jumlah		1.986,62	1.596.944,16

Sumber : Statistik Budidaya Jawa Timur, 2013

Dari tabel hasil produksi ikan hias di Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 dapat dilihat bahwa tingkat hasil produksi ikan hias di Kabupaten Pasuruan sangat tinggi. Jumlah pembudidaya ikan hias di Kabupaten Pasuruan yaitu 38 keluarga dari Rumah Tangga Perikanan ikan hias dan terdiri dari 38 orang pembudidaya ikan hias.

4.2.8. Pemasaran Hasil Perikanan

Kegiatan pemasaran merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam proses produksi. Hasil produksi perikanan Kabupaten Pasuruan juga dipasarkan ke luar daerah, seperti : Bojonegoro, Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto, Jombang, Malang, Madiun. Dalam pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Pasuruan, jenis komoditi perikanan yang dipasarkan adalah ikan segar dan produk olahan. Ikan segar yang dikirim ke luar daerah yaitu ikan lele dan ikan nila.

Selain pengiriman ke luar daerah, Kabupaten Pasuruan juga mendapat pemasukan dari luar daerah, seperti : Lamongan, Jombang, Sidoarjo, Surabaya dan Tuban. Adanya pemasukan dari luar daerah ke Kabupaten Pasuruan disebabkan karena hasil produksi perikanan Kabupaten Pasuruan khususnya perikanan tangkap mengalami penurunan. Permintaan pasar untuk produk perikanan di Kabupaten Pasuruan cukup besar karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi ikan sebagai sumber protein atau gizi.

4.2.9. Tingkat Konsumsi Ikan

Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Pasuruan terbilang masih rendah yang disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara pengolahan ikan sesuai dengan keinginan dan juga belum mengetahui kandungan gizi maupun protein dari ikan. Akan tetapi belakangan ini

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pasuruan mulai melakukan sosialisasi ke daerah rawan kekurangan gizi dan melaksanakan beberapa kegiatan yang agar masyarakat gemar mengkonsumsi ikan. Perkembangan konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Konsumsi ikan tahun 2011 – 2013

Tahun	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	Persentase Perubahan (%)
2011	18,81	-
2012	24,04	11,70
2013	24,32	0,49

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan, 2013

Dari tabel konsumsi ikan pada tahun 2011 sampai dengan 2013 dapat diketahui bahwa konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan, bahkan peningkatan tersebut telah mencapai standart nasional tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia. Menurut Sindonews (2013), standart nasional tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia pada tahun 2011 adalah sebesar 19,09 kg per kapita per tahun, tahun 2012 sebesar 24,01 kg per kapita per tahun, dan tahun 2013 sebesar 24,17 kg per kapita per tahun. Perhitungan konsumsi ikan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Konsumsi} = \frac{A+B-C+15\% \text{ produksi (tercecer)}}{D}$$

Keterangan :

A = Hasil produksi (segar dan olahan yang dikonversi segar) kg

B = Pemasukan ikan dari luar daerah (segar dan olahan yang dikonversi segar) kg

C = Pengiriman ikan ke luar daerah (segar dan olahan yang dikonversi segar) kg

D = Jumlah penduduk

4.2.10. Penghasilan Rata-Rata

Pembangunan perikanan adalah bagian dari pembangunan nasional yang kegiatannya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan. Salah satu contohnya yaitu dengan meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan guna meningkatkan kualitas hidup dalam masyarakat. Perkembangan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 15 dan tabel 16.

Tabel 15. Pendapatan Nelayan di Kabupaten Pasuruan

Tahun	Pendapatan Nelayan (Rupiah/Bulan)	Persentase Perubahan (%)
2011	1.690.000	-
2012	2.434.820	44,07
2013	2.670.000	9,66

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Pasuruan, 2013

Tabel 16. Pendapatan Pembudidaya ikan di Kabupaten Pasuruan

Tahun	Pendapatan Pembudidaya ikan (Rupiah/Bulan)	Perentase Perubahan (%)
2011	3.514.000	-
2012	4.150.000	18,10
2013	7.260.000	74,94

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Pasuruan, 2013

Dari tabel pendapatan nelayan dan pembudidaya di Kabupaten Pasuruan tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan tiap tahun. Namun demikian, pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan ini masih dibawah Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan yaitu sebesar Rp. 2.800.000 per bulan yang berarti sebesar Rp. 33.600.000 pe tahun. Oleh karena itu, peningkatan hasil produksi perikanan perlu ditingkatkan untuk

mendapatkan hasil yang optimal. Selain itu, diimbangi juga dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan teknologi.

4.2.11. Penyerapan Tenaga Kerja pada Usaha Perikanan

Kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Pasuruan khususnya pada usaha budidaya ikan dapat menghasilkan keuntungan yang relatif besar dan stabil membuat minat masyarakat semakin meningkat untuk menjadikan ini sebagai peluang usaha. Perkembangan penyerapan tenaga kerja pada usaha perikanan di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 17.

Tabel 17. Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2013

Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
Nelayan	7.212
Pembudidaya Ikan	6.936

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Pasuruan, 2013

Jumlah nelayan yang ada di Kabupaten Pasuruan berjumlah 7.212 tersebut terdiri dari nelayan laut sebanyak 7.097 orang, nelayan andon 50 orang, dan nelayan perairan umum sebanyak 65 orang. Peningkatan jumlah nelayan dan pembudidaya ikan ini merupakan suatu peluang Kabupaten Pasuruan untuk menjadikan sektor perikanan sebagai lapangan usaha baru sehingga dapat meminimalkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Namun dalam pelaksanaan usaha perikanan ini harus ditingkatkan lagi mengenai kualitas sumberdaya manusia dan teknologi agar dapat mengoptimalkan hasil produksi perikanan.

4.2.12. Balai Benih Ikan (BBI)

Benih merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kegiatan usaha perikanan. Oleh karena itu dibutuhkan benih yang unggul dalam proses produksi sehingga dapat menghasilkan produk perikanan yang bermutu.

Balai Benih Ikan (BBI) yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan adalah Balai Benih Ikan (BBI) Penataan. Balai benih Ikan (BBI) Penataan dibangun pada tahun 2004 berlokasi di desa Penataan Kecamatan Winongan dengan luas 3,2 Ha. Sarana dan prasarana BBI Penataan cukup lengkap berupa kantor, gedung serbaguna, mess karyawan, gedung peralatan laboratorium basah dan kering, gedung unit pembuatan pakan, 40 kolam dalam berbagai jenis dan ukuran serta unit keramba jaring apung untuk pembesaran di danau Grati.

Keberadaan BBI Penataan punya peranan penting dalam usaha perikanan yaitu:

- Penyedia benih ikan bermutu untuk memenuhi kebutuhan pembudidaya ikan
- Tempat pemuliaan induk-induk unggul
- Tempat pembinaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) di sekitar BBI Penataan
- Sebagai lokasi untuk magang dan pelatihan perikanan

BBI Penataan saat ini lebih fokus pada produksi benih nila dan lele. Disamping tetap mengembangkan produksi gurame, lobster air tawar dan koi. BBI Penataan mampu memproduksi benih ikan nila unggul monosex jantan yang dihasilkan dari penggunaan hormon Methyl Testosteron (MT) dan induk betina Estradiol. Benih nila yang diproduksi jenis monosex jantan yaitu 85 persen berkelamin jantan italada, Gift G3 dan Kekar. Benih nila monosex jantan produksi BBI Penataan punya laju pertumbuhan lebih cepat dibanding benih nila biasa

sehingga usaha budidaya lebih ekonomis. Sedangkan benih lele yang diproduksi BBI Penataan yaitu jenis Sangkuriang dan Paioton. Produksi benih ikan BBI Penataan di tahun 2013 mencapai 3.823,30 benih.

4.2.12. Sentra Aquabis Perikanan (SAP)

Sentra Aquabis Perikanan (SAP) merupakan pengembangan dari pasar benih yang berlokasi di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Merupakan salah satu prasarana dasar di bidang perikanan untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang dunia ikan, memberikan pelayanan uji kualitas air dan kesehatan ikan, sarana pemasaran produk perikanan dan tempat untuk menggelar even (kontes/lomba). Sentra Aquabis Perikanan (SAP) nantinya merupakan unit kerja di bawah pengelolaan dan pengawasan Dinas Kehewan-an Kabupaten Pasuruan yang membidangi perikanan untuk melaksanakan tugas pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat perikanan. Pembangunan Sentra Aquabis Perikanan (SAP) merupakan pembangunan pasar benih ikan baru sehingga sarana dan prasarana yang ada belum sempurna, sehingga akan ada penambahan sarana dan prasarana pendukungnya.

Pembangunan Sentra Aquabis Perikanan (SAP) Pandaan di biyai Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun anggaran 2012 sampai 2013 di harapkan menjadi pusat informasi potensi dan pengetahuan tentang dunia ikan di Kabupaten Pasuruan. Visi dan Misi Sentra Aquabis Perikanan (SAP) yang telah dituangkan dalam rencana kegiatan yaitu sebagai pusat informasi potensi dan pengetahuan tentang dunia ikan di Kabupeten Pasuruan sekaligus berfungsi memberikan pelayanan uji kualitas air dan kesehatan ikan.

Komoditas unggulan pada SAP Pandaan yaitu lobster air tawar dalam bentuk benih maupun konsumsi, nila dan gurami. Sedangkan komoditas pengembangan berupa ikan bawal tawar, sidat, tombro, dan ikan hias.

4.3. Hubungan Antara Sektor Perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan

Analisis hubungan antara sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan dilakukan untuk mengetahui besarnya kekuatan hubungan sektor perikanan dan PAD Kabupaten Pasuruan. Metode yang akan digunakan adalah analisis korelasi.

Analisis korelasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengkaji hubungan antar 2 variabel atau lebih untuk menjawab pertanyaan seperti: apakah antar variabel mempunyai hubungan atau tidak mempunyai hubungan sama sekali atau seberapa kuatkah hubungan antar variabel tersebut. Tingkat keeratan hubungan tersebut ditunjukkan dengan suatu besaran yang disebut koefisien korelasi yang dilambangkan dengan huruf r . Apabila hasil hubungan kedua variabel tersebut bernilai positif yang menunjukkan bahwa apabila nilai variabel x meningkat maka nilai variabel y juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Namun apabila hasil hubungan kedua variabel tersebut bernilai negatif maka apabila nilai variabel x meningkat maka nilai variabel y akan menurun, begitu pula sebaliknya.

Variabel x pada penelitian ini adalah sektor perikanan Kabupaten Pasuruan dan variabel y adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan. Pada lampiran 1 dapat dilihat bahwa hasil analisis korelasi antara sektor perikanan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan menunjukkan nilai sebesar 0,928136 berarti kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang kuat atau erat dan bentuk hubungannya adalah linear positif yang kuat artinya jika sektor perikanan mengalami kenaikan, maka PAD Kabupaten Pasuruan akan ikut naik.

4.4 Kontribusi Sektor Perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Pasuruan

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), *pro-growth* (pertumbuhan), dan *pro-environment* (pemulihan dan pelestarian lingkungan), dimana sektor kelautan dan perikanan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan dan secara prinsipil direncanakan serta disusun sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional, dilakukan secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, diintegrasikan dengan tata ruang wilayah dengan memperhatikan potensi dan prioritas daerah serta dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Otonomi daerah tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya kemampuan keuangan daerah yang memadai. Oleh karena itu, selain memberikan wewenang, pemerintah pusat juga memberikan dukungan dana untuk memperkuat keuangan daerah.

Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka pemerintah Kabupaten Pasuruan juga menetapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keuangan daerah adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari

pungutan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Sumber – sumber Pendapata Asli Daerah (PAD) adalah hasil pajak daerah dan demokrasi, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kabupaten Pasuruan memiliki beberapa sektor penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor- sektor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan Daerah
2. Sekretariat Daerah Bagian Keuangan
3. Dinas Perijinan
4. Dinas Perhubungan
5. Dinas Perdagangan dan Pasar
6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
7. Dinas Kelautan dan Perikanan
8. Dinas Kesehatan
9. Rumah sakit Umum Daerah
10. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
11. Dinas Pariwisata

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor penyumbang PAD di Kabupaten Pasuruan. Berikut ini merupakan hasil kontribusi yang diberikan sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan yang dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Kontribusi Sektor Perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2013

No.	Sektor Perikanan	Kontribusi (satuan Rp.1000)	Presentase (%)
1.	Penangkapan Perairan Umum	1.410.671,2	0,36
2.	Penangkapan Laut	80.982.501	20,8
3.	Budidaya Tambak	228.504.155	58,7
4.	Budidaya Kolam	20.183.311	5,18
5.	Budidaya Keramba	14.896.488,4	3,8
6.	Ikan Hias	1.596.944,16	0,46
7.	BBI	41.609.500	10,7
Total		389.183.570,76	100

Sumber : Kabupaten Pasuruan Dalam Angka, 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan dari sektor perikanan pada tahun 2013 mencapai nilai lebih dari angka yang di targetkan. Namun kontribusi sektor perikanan terhadap PAD Kabupaten Pasuruan masih sangat kecil jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya penyumbang PAD yang terdapat di Kabupaten Pasuruan yang dapat dilihat rinciannya pada Tabel 19 dan Lampiran 2. Dengan demikian diharapkan sektor perikanan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap PAD dengan potensi yang ada di Kabupaten Pasuruan.

Tabel 19. Rata –Rata Kontribusi Seluruh Sektor Terhadap PAD Kabupaten Pasuruan Tahun 2013

No.	Nama Sektor Penyumbang PAD	Nilai (%)
1.	Dinas Pendapatan Daerah	83,3155
2.	Sekretariat Daerah Bagian Keuangan	0,0793
3.	Dinas Perijinan	4,5617
4.	Dinas Perhubungan	10,7618
5.	Dinas Perdagangan dan Pasar	5,9485
6.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	0,1318
7.	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,684
8.	Dinas Kesehatan	25,5341
9.	Rumah Sakit Umum Daerah	148,6614
10.	Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil	4,7119
11.	Dinas Pariwisata	0,5295

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Pasuruan, 2013

Dari tabel 19 dapat dilihat bahwa presentase kontribusi sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan sektor lainnya. Namun hal ini dapat terjadi dikarenakan tidak semua pajak yang berkaitan dengan perikanan tidak termasuk dalam dinas perikanan. Misalnya, biaya izin mendirikan pabrik pupuk, restoran ikan dan lainnya.

Kontribusi terbesar diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah. Hal ini berarti bahwa sebagian besar masyarakat Pasuruan mengalami gizi yang kurang baik sehingga keadaan ini dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan tingkat konsumsi ikan yang memiliki gizi yang tinggi dan dengan harga yang cukup murah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis potensi sektor perikanan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Potensi sektor perikanan di Kabupaten Pasuruan meliputi penangkapan di laut, penangkapan di perairan umum dan budidaya air tawar. Dengan total produksi dari ketiga sektor tersebut sebesar 21.932,26 ton dan nilai produksi sebesar 345.977.126,2.
2. Kontribusi sektor perikanan terhadap PAD Kabupaten Pasuruan pada tahun 2013 sebesar 0,684%. Namun kontribusi sektor perikanan terhadap PAD Kabupaten Pasuruan masih sangat kecil bila dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.
3. Koefisien Korelasi antara sektor perikanan dan Pendapatan Asli Daerah adalah **0,928136**, berarti kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang **KUAT** dan bentuk hubungannya adalah Linear Positif.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas dan dari kesimpulan yang didapat maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pendapatan sektor perikanan perlu lagi menggali potensi-potensi yang ada, dan memaksimalkan potensi yang ada.

Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan mempermudah pelayanan public dalam pembayaran pajak sehingga pajak dapat terserap maksimal, melaksanakan Investasi pada usaha-usaha yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, dan yang terakhir

adalah meminta bagi hasil pajak daerah seperti pajak cukai yg seluruhnya merupakan penerimaan pusat.

2. Meningkatkan kualitas kerja dengan pembekalan pendidikan, latihan dan penyuluhan yang mengikutsertakan tidak hanya pegawai dinas kelautan dan perikanan melainkan juga dari nelayan, masyarakat petani ikan di pelosok-pelosok daerah sehingga mampu bersaing di pasar dan juga sebagai upaya menarik pihak ketiga (investor) untuk datang ke daerah yang memiliki sumber daya manusia tinggi agar tertarik menanamkan modalnya guna kepentingan pembangunan daerah.
3. Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk lebih cepat menangani segala bentuk permasalahan yang dihadapi oleh nelayan dan pembudidaya ikan, serta menambah adanya kelengkapan pendukung untuk para nelayan dalam menjalankan pekerjaan mereka sehari-hari dan distribusi dana bantuan yang merata pada nelayan-nelayan di daerah juga bisa dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhizal. 2011. **Meninjau Konsep Kesenjangan Kesejahteraan**.
<http://beppeda.jabarprov.go.id/pdf>.
- Basri, Faisal. 2006. **Otonomi Daerah : Divisi Kajian Demokrasi Lokal**.
Yayasan Harkat Bangsa. Jakarta.
- Bravo, S. 2009. **Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan**.
<http://groups.yahoo.com/group/dikmenjur/message/72775>.
- Daryanto, Arief. 2007. **Dari Klaster Menuju Peningkatan Daya Saing Industri Perikanan**. Buletin Craby & Starky, Edisi Januari 2007.
- Faisal, Basri. 2006. **Otonomi Daerah. Divisi Kajian Demokrasi Lokal**. Yayasan Harkat Bangsa. Jakarta.
- Giri, Ferdinan. 1995. **Otonomi Daerah**. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Halim, A. 2001. **Anggaran Daerah dan "fiscal Stress" (Sebuah studi kasus pada anggaran daerah provinsi di Indonesia)**. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia.
- Halim, A. 2002. **Seri Akutansi Sektor Publik – Akutansi Keuangan Daerah**. PT. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, A. 2004. **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah**. Salemba Empat. Jakarta.
- Handoyo, Hestu Cipto. 2007. **Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi Dan Urusan Rumah Tangga Daerah**. Penerbit Universitas Atmajaya. Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online**. 2010.
<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>.
- Kaho, Josep Riwu. 2007. **Prospek Otonomi Daerah**. CV.Rajawali. Jakarta.
- Mamesah, D. J. 1995. **Sistem Administrasi Keuangan Daerah**. Gramedia Utama. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**. AndiOffset. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2012. **Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi**. PT.Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Monintja, D. 2001. **Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir Dalam Bidang Perikanan Tangkap. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu**. Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir, Institut Pertanian Bogor.

Nataluddin. 2001. **Potensi dana perimbangan pada pemerintahan daerali di Propinsi Jambi,Manajemen Keuangan Daerah.** UPP YKPN. Yogyakarta.

Nazir, Mohammad. 2003. **Metod Penelitian.** Ghalia Indonesia. Jakarta.

Ningsih. 2005. **Strategi Mengelola dan Memanfaatkan Sumber Daya Laut dan Perikanan.** Majalah Info Kajian Bappenas, Volume 2.

Siahaan, M.P. 2010. **Pajak Daerah dan Retribusi di Indonesia.** PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sugiyono. 2013. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B.** Alfabeta. Bandung.

Sunindhia, Y.W. 1987. **Praktek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.** Penerbit Bina Aksara. Jakarta.

Suparmoko. 2002. **Ekonomi Publik.** ANDI. Yogyakarta.

Surachmad, W. 1985. **Pengantar Penelitian Ilmiah.** Tarsito. Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Departemen Dalam negeri Republik Indonesia, Jakarta 2004.

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Kelautan dan Perikanan.

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Kelautan dan Perikanan.

Usman, Husaini dan Akbar, P.S. 2006. **Metodologi Penelitian Sosial.** PT.Bumi Aksara.Jakarta.

Yani, Ahmad. 2002. **Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah di Indonesia. Edisi I.** PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Analisis Korelasi antara Sektor Perikanan terhadap PAD Kabupaten Pasuruan

No.	Kontribusi sektor perikanan (X=1.000.000)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y=1.000.000)	X ²	Y ²	XY
1.	211,525	9.000	44742,82563	81000000	1903725
2.	235,7255	5.000	55566,51135	25000000	1178627,5
3.	269,327	4.000	72537,03293	16000000	1077308
4.	302,8166	30.570	91697,89324	934524900	9257103,462
5.	389,18357	56.901	151463,8512	3237723801	22144934,32
Jumlah	1408,57767	105471	416008,1143	4294248701	35561698,28

$$\begin{aligned}
 r &= \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}} \\
 &= \frac{(5 \times 35561698,28) - (1408,57767)(105471)}{\sqrt{\{5 \times 416008,1143 - (1408,57767)^2\} \{5 \times 4294248701 - (105471)^2\}}} \\
 &= 0,928136
 \end{aligned}$$



Lampiran 2. Perhitungan Nilai Kontribusi Sektor- Sektor di Kabupaten Pasuruan terhadap PAD Kabupaten Pasuruan

Rumus Perhitungan :

$$\frac{\text{PAD Sektor } x \text{ Kabupaten Pasuruan (Rp)}}{\text{PAD seluruh sektor Kabupaten Pasuruan (Rp)}} \times 100\%$$

1. Dinas Pendapatan Daerah

Tahun	PAD Dinas Pendapatan Daerah (Rp)	PAD Kabupaten Pasuruan (Rp)	Persentase (%)
2009	30.333.464.190,45	9.000.000.000	337,0385
2010	28.659.981.065,57	5.000.000.000	573,1996
2011	26.946.940.050,53	4.000.000.000	673,6735
2012	36.715.301.137,41	30.570.000.000	120,1024
2013	49.114.390.217,73	56.901.000.000	86,3155

2. Sekretariat Daerah Bagian Keuangan

Tahun	PAD Sekretariat Daerah Bagian Keuangan (Rp)	PAD Kabupaten Pasuruan (Rp)	Persentase (%)
2009	-	9.000.000.000	
2010	21.427.000,00	5.000.000.000	0,4285
2011	40.000.000,00	4.000.000.000	10
2012	37.485.000,00	30.570.000.000	0,1226
2013	45.140.000,00	56.901.000.000	0,0793

3. Dinas Perijinan

Tahun	PAD Dinas Perijinan (Rp)	PAD Kabupaten Pasuruan (Rp)	Persentase (%)
2009	-	9.000.000.000	
2010	519.600.611,00	5.000.000.000	10,392
2011	1.826.168.332,00	4.000.000.000	45,6542
2012	2.454.066.227,00	30.570.000.000	8,0277
2013	2.595.652.003,00	56.901.000.000	4,5617

4. Dinas Perhubungan

Tahun	PAD Dinas Perhubungan (Rp)	PAD Kabupaten Pasuruan (Rp)	Persentase (%)
2009	3.227.202.600,00	9.000.000.000	35,8578
2010	3.944.781.000,00	5.000.000.000	78,8956
2011	4.380.652.050,00	4.000.000.000	109,5163
2012	5.516.144.000,00	30.570.000.000	18,0443
2013	6.123.557.800,00	56.901.000.000	10,7618

5. Dinas Perdagangan dan Pasar

Tahun	PAD Dinas Perdagangan dan Pasar (Rp)	PAD Kabupaten Pasuruan (Rp)	Persentase (%)
2009	2.040.762.850,00	9.000.000.000	22,6751
2010	2.517.349.310,00	5.000.000.000	50,347
2011	2.797.411.260,00	4.000.000.000	69,9353
2012	3.338.611.140,00	30.570.000.000	10,9212
2013	3.384.729.310,00	56.901.000.000	5,9485

6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Tahun	PAD Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Rp)	PAD Kabupaten Pasuruan (Rp)	Persentase (%)
2009	117.500.000,00	9.000.000.000	1,3056
2010	150.000.000,00	5.000.000.000	3
2011	110.500.000,00	4.000.000.000	2,7625
2012	54.500.000,00	30.570.000.000	0,1783
2013	75.000.000,00	56.901.000.000	0,1318

7. Dinas Kelautan dan Perikanan

Tahun	PAD Dinas Kelautan dan Perikanan (Rp)	PAD Kabupaten Pasuruan (Rp)	Persentase (%)
2009	211.525.000,00	9.000.000.000	2,3503
2010	235.725.500,00	5.000.000.000	4,7145
2011	269.327.000,00	4.000.000.000	6,7332
2012	302.816.600,00	30.570.000.000	0,9906
2013	389.183.570,76	56.901.000.000	0,684

8. Dinas Kesehatan

Tahun	PAD Dinas Kesehatan (Rp)	PAD Kabupaten Pasuruan (Rp)	Persentase (%)
2009	4.673.378.100,00	9.000.000.000	51,9264
2010	5.111.430.250,00	5.000.000.000	102,2286
2011	5.632.787.380,00	4.000.000.000	140,8197
2012	9.005.580.850,00	30.570.000.000	29,4589
2013	14.529.171.495,00	56.901.000.000	25,5341

9. Rumah Sakit Umum Daerah

Tahun	PAD Dinas RSUD (Rp)	PAD Kabupaten Pasuruan (Rp)	Persentase (%)
2009	53.942.394.616,00	9.000.000.000	599,3599
2010	46.607.346.612,52	5.000.000.000	932,1469
2011	63.481.047.855,33	4.000.000.000	1587,026
2012	63.980.007.126,64	30.570.000.000	209,2902
2013	84.589.817.609,03	56.901.000.000	148,6614

10. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Tahun	PAD Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Rp)	PAD Kabupaten Pasuruan (Rp)	Persentase (%)
2009	1.185.276.500,00	9.000.000.000	13,1697
2010	1.961.438.500,00	5.000.000.000	39,2288
2011	3.263.739.500,00	4.000.000.000	81,5935
2012	2.379.637.000,00	30.570.000.000	7,7842
2013	2.681.091.000,00	56.901.000.000	4,7119

11. Dinas Pariwisata

Tahun	PAD Dinas Kesehatan (Rp)	PAD Kabupaten Pasuruan (Rp)	Persentase (%)
2009	69.515.000,00	9.000.000.000	0,7724
2010	35.685.000,00	5.000.000.000	0,7137
2011	35.570.000,00	4.000.000.000	0,8893
2012	403.003.000,00	30.570.000.000	1,3183
2013	301.276.000,00	56.901.000.000	0,5295